

	<p style="text-align: center;"><b>BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI</b>  <b>BADAN KEPERGAWAIAN DAERAH</b>  <b>PROVINSI JAWA TENGAH</b></p>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; 2. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS ; 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki kemampuan teknis wawancara / konseling ;</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer.</li> <li>- Memahami peraturan disiplin PNS</li> </ul>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	1. Komputer / laptop, printer ; 2. Peraturan perundang-undangan.
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			<b>KET</b>
	JFU/JFT	Kepala Bidang	Kepala BKD	Sekretaris Daerah	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1 Memberikan disposisi kepada Kabid atas surat usulan pemberhentian sementara PNS.					Surat dari PD Kepala BKD	1 jam	Surat PD yang telah didisposisi Kepala BKD	
2 Meneliti berkas usulan pemberhentian sementara PNS					Surat PD yang telah didisposisi Kepala BKD	1 jam	Surat dari PD yang telah didisposisi Kabid	
3 Membuat konsep SK pemberhentian sementara PNS menyediakan kepada Kabid					- Surat dari PD yang telah didisposisi Kabid - Surat penahanan - SK Pengangkatan Pejabat	1 hari	Konsep SK pemberhentian sementara PNS	

4	Mencermati serta memberikan paraf dan meneruskan kepada Kepala BKD				Konsep nota dinas dan konsep SK pemberhentian sementara PNS	1 jam	Konsep nota dinas dan SK pemberhentian sementara PNS
5	Menandatangani SK Pemberhentian Sementara				Konsep nota dinas dan SK pemberhentian sementara PNS	1 jam	SK pemberhentian sementara PNS yang ditandatangani Kepala BKD bagi PNS Kecuali JPT
6	Menandatangani SK Pemberhentian Sementara				Surat Usulan Pemberhentian Sementara PNS yang sudah di ttd Ka BKD	1 hari	SK pemberhentian sementara PNS bagi JPT yang ditandatangani Sekretaris Daerah

